



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2021

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

"BERANI UNTUK KALTIM BERDAULAT"



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

"Berani Untuk Kaltim Berdaulat"

Jalan Muhammad Yamin Nomor 1 Samarinda

Telepon (0541) 748549 Fax. (0541) 741925

Website : www.bkd.kaltimprov.go.id Email: bkd@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 800/I.1- 1600/BKD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN, MONITORING DAN EVALUASI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DILINGKUNGAN BKD PROV. KALTIM
TAHUN 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka kepentingan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu untuk dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Tim Monitoring Evaluasi Laporan Kinerja dilingkungan BKD Prov. Kaltim tahun 2021;
- b bahwa pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Tim Monitoring Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2021 pada kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Cara Kerja BKD Prov. Katlim;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Penilaian Kompetensi Pegawai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Tim Monitoring Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2021 kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran dan surat keputusan ini;

KEDUA : Kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Tim Monitoring Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2021, dalam melaksanakan tugasnya, Tim harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran langsung Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2021 pada kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal, 1 Februari 2021

KEPALA,



Drs. Dedy Rusdiansyah Anan Dani, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP: 19640627 199003 1006

Lampiran : Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor: 800/I.1- 1600/BKD
Tanggal: 1 Februari 2021

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN
TIM MONITORING EVALUASI LAPORAN KINERJA
DILINGKUNGAN BKD PROV. KALTIM
TAHUN 2021**

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kasubbag. Perencanaan Program
- Anggota : 1. Kepala Bidang Mutasi ASN
2. Kepala Bidang Pengembangan ASN
3. Kepala Bidang Pembinaan ASN
4. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN
5. Kasubbag/Kasubbid Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. Jabatan Pelaksana/JFT Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur



KEPALA,

Drs. Diddy Rusdiansyah Anan Dani, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP: 19640627 199003 1006

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat menyusun sekaligus menerbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021, dan semoga kita selalu berupaya secara konsisten untuk terus menegakkan serta meningkatkan komitmen dan produktivitas kinerja yang optimal dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai komitmen serta tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023, yang dibuat secara periodik dan berisikan informasi mengenai kinerja organisasi dalam mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar.

Mudah-mudahan, penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ini menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun, serta dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang, agar dapat melaksanakan kinerja secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Samarinda, Februari 2022
Kepala Badan Kepegawaian Daerah,



Drs. Diddy Rusdiansyah Anan Dani, M.M

Pembina Utama Madya

NIP. 19640627 199003 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, pada tahun tersebut implementasi dari Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), telah memberikan arah dalam mendukung Misi ke 5 Gubernur Kalimantan Timur yaitu **“Berdaulat dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional, dan Berorientasi Pelayanan Publik”**. Secara umum capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dapat dinyatakan “Sangat Baik”. Hal ini tercermin dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama menunjukkan capaian kerjanya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Faktor utama penentu keberhasilan ini adalah komitmen yang kuat dari jajaran Pimpinan dan seluruh Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk memfokuskan sumber daya organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra 2019-2023 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021. Keberhasilan ini pada umumnya karena Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah merubah paradigmanya sebagai penyelenggara administrasi kepegawaian menjadi penyelenggara manajemen kepegawaian yang berkualitas, mulai dari proses perencanaan kebutuhan; pengadaan; pengembangan karir; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan, dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; sistem informasi kepegawaian, maupun pelayanan di bidang kepegawaian dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel berdasarkan ketentuan yang ada.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021 telah melaksanakan semua program dan kegiatan yang diwujudkan dalam 2 (dua) Sasaran Strategis antara lain :

1. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi yang berbasis kualifikasi dan kompetensi.
2. Terwujudnya pelayanan prima di bidang kepegawaian

Kedua Sasaran Strategis ini merupakan *“core business”* BKD Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara profesional dan membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian tujuannya.

Keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada Sasaran ke-1 “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional,

berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi yang berbasis kualifikasi dan kompetensi “, antara lain: “Skor Sistem Merit dan Indeks Profesionalitas ASN” dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 103%. Realisasi anggaran pada sasaran ini sebesar 96 %;

2. Pada Sasaran ke-2 “Terwujudnya pelayanan prima di bidang kepegawaian” dengan indikator “Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)” dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 105%. Realisasi anggaran pada sasaran ini sebesar 84,16%;

Hasil pengukuran rata-rata keseluruhan capaian sasaran indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 mencapai 103% dan semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan **Kategori Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2021 sudah dilaksanakan dengan baik dan akan dipertahankan serta ditingkatkan pada tahun berikutnya.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dapat digunakan sebagai evaluasi dan analisa program dan kegiatan dengan prinsip memegang teguh disiplin anggaran, tepat waktu dan tepat sasaran, serta dapat bermanfaat bagi pihak pelaksana dan pihak yang terkait lainnya dalam peningkatan kualitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Lampiran.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi	8
D. Sumber Daya Manusia.....	9
E. Aspek Strategis Organisasi	11
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	13
G. Sarana dan Prasarana Kerja	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Perencanaan Strategis.....	20
B. Indikator Kinerja Utama.....	24
C. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	26
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	28
C. Analisis Capaian Kinerja.....	29
D. Realisasi Anggaran.....	50
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja BKD Prov. Kaltim ..	53
B. Strategi Peningkatan Kinerja di masa yang akan datang	55
 Lampiran - Lampiran	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1** : Rekapitulasi Pegawai BKD Prov. Kaltim Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan Tahun 2021;
- Tabel 1.2** : Rekapitulasi PNS BKD Prov. Kaltim Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021;
- Tabel 1.3** : Isu-Isu Strategis BKD Prov. Kaltim
- Tabel 1.4** : Analisis SWOT
- Tabel 1.5** : Sarana dan Prasarana Kantor BKD Prov. Kaltim Tahun 2021
- Tabel 2.1** : Matriks Hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Sasaran BKD Prov. Kaltim
- Tabel 2.2** : Matriks Program dan Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran BKD Prov. Kaltim
- Tabel 2.3** : Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Prov. Kaltim
- Tabel 2.4** : Perjanjian Kinerja BKD Prov. Kaltim Tahun 2021
- Tabel 2.5** : Target Belanja BKD Prov. Kaltim Tahun 2021
- Tabel 2.6** : Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis BKD Prov. Kaltim Tahun 2021
- Tabel 3.1** : Gambaran Umum Implementasi Hasil Evaluasi SAKIP
- Tabel 3.2** : Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP BKD Prov. Kaltim
- Tabel 3.3** : Tindaklanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Prov. Kaltim Terhadap Laporan Hasil Evaluasi Sistem AKIP BKD Prov. Kaltim
- Tabel 3.4** : Pengukuran Capaian Kinerja BKD Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2021
- Tabel 3.5** : Perbandingan antar Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
- Tabel 3.6** : Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Periode 2020
- Tabel 3.7** : Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Periode 2021
- Tabel 3.8** : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Renstra
- Tabel 3.9** : Rincian Pencapaian Per Aspek Skor Sistem Merit Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- Tabel 3.10** : Rincian Per Aspek Indeks Profesionalitas ASN Pemprov.Kaltim
- Tabel 3.11** : Rata-Rata Skor dan Peringkat pada Pengguna Layanan BKD Prov.Kaltim
- Tabel 3.12** : Indeks Kepuasan Pelayanan BKD Prov.Kaltim
- Tabel 3.13** : Rencana Aksi dalam mendukung kegiatan BKD Prov. Kaltim
- Tabel 3.14** : Hasil Perbandingan Output dan Input dengan Standar Efisien BKD Prov. Kaltim Tahun 2021
- Tabel 3.15** : Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan BKD Prov.

Kaltim

Tabel 3.16 : Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan Tahun 2021

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Lampiran 2** : Pengukuran Kinerja Tahun 2021
- Lampiran 3** : Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bulanan
- Lampiran 4** : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Per Triwulan
- Lampiran 5** : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Per Triwulan
- Lampiran 6** : Rincian Pelayanan BKD Prov.Kaltim

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar hukum pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam pasal 6 (d) yang berbunyi “Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian”.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur yang bertugas membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian. Salah satu *outcome* yang hendak dicapai BKD Prov. Kaltim adalah sumber daya aparatur yang profesional sebagai implementasi dari *good governance*. *Outcome* tersebut mewujudkan melalui pembaharuan manajemen kepegawaian. BKD Prov. Kaltim dalam mewujudkan hal tersebut melalui *core business*-nya: “menata kepegawaian yang dilakukan secara profesional”.

BKD Prov. Kaltim akan sepenuhnya menjalankan peran strategisnya menjadi katalisator pembaharuan manajemen kepegawaian melalui penataan pegawai yang profesional menuju sumber daya aparatur yang profesional.

Dengan dikembangkan dan diterapkannya sistem AKIP di BKD Prov. Kaltim maka akuntabilitas kinerja di sektor sumber daya manusia aparatur di daerah dapat ditingkatkan. Pencapaian kinerja sektor kepegawaian dapat dikomunikasikan kepada para *stakeholders* sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanat yang mereka berikan. Pertanggungjawaban kinerja ini mendukung tercapainya pemerintahan yang profesional. Kemudian informasi kinerja yang ada dapat dimanfaatkan oleh instansi Pemerintah Daerah Prov. Kaltim sebagai perbaikan kinerja.

Dasar hukum mengenai keberadaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut adalah :

1. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Penilaian Kompetensi Pegawai.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas pokok, yaitu : “Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi”.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Bidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN, mutasi ASN, pengembangan ASN serta pembinaan ASN;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis pengadaan, pemberhentian, informasi ASN;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis mutasi ASN;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan ASN;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan ASN;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi ASN, mutasi ASN, pengembangan ASN dan pembinaan ASN;
- h. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Adapun rincian/penjabaran Tugas pokok dan fungsi masing-masing unit di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

- a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - Perumusan Kebijakan Bidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN, mutasi ASN, pengembangan ASN serta pembinaan ASN;
 - Pelaksanaan kebijakan teknis pengadaan, pemberhentian, informasi ASN;
 - Pelaksanaan kebijakan teknis mutasi ASN;
 - Pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan ASN;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi ASN, mutasi ASN, pengembangan ASN dan pembinaan ASN;
 - Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - Pembinaan jabatan fungsional; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengoordinasian, penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan;
 - Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan anggaran, pelaporan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset;
 - Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, kehumasan, pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, evaluasi dan pelaporan kinerja ASN;
- c. Bidang Pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, serta pengembangan teknis dalam pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN.

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN;
- Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan pengadaan ASN;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pemberhentian ASN;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang sistem informasi dan pengolahan data ASN;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam perencanaan dan pengadaan ASN, pemberhentian ASN serta sistem informasi dan pengolahan data ASN;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya;

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN terdiri dari :

- Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan ASN, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, analisis, pengaturan teknis, fasilitasi, pengendalian dan pelaporan dalam perencanaan dan pengadaan ASN.
- Sub Bidang Pemberhentian ASN, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, analisis, pengaturan teknis, fasilitasi dan pengendalian dan pelaporan dalam proses pemberhentian ASN.
- Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data ASN, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengaturan teknis, fasilitasi, evaluasi dan pengembangan terhadap sistem informasi dan pengolahan data ASN.

- d. Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis dalam pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan Mutasi ASN.

Bidang Mutasi mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang mutasi ASN;
- Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang mutasi ASN;

- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang mutasi jabatan pelaksana;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang kepegangatan ASN;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang mutasi jabatan structural;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan mutasi jabatan pelaksana, kepegangatan dan mutasi jabatan structural;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Mutasi terdiri dari :

- Sub Bidang Mutasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, analisis, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan mutase jabatan pelaksana.
 - Sub Bidang Kepegangatan Pegawai, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, analisis, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan mengenai kepegangatan.
 - Sub Bidang Mutasi Jabatan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, analisis, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan mutase jabatan struktural.
- e. Bidang Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian teknis dalam pengembangan ASN.

Bidang Pengembangan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan ASN;
- Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Pengembangan ASN;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Subbidang Peningkatan Kualitas ASN;

- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Subbidang Sertifikasi Jabatan ASN;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pembinaan jabatan fungsional ASN;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas ASN, sertifikasi jabatan ASN serta pembinaan jabatan fungsional ASN;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Pengembangan terdiri dari :

- Sub Bidang Peningkatan Kualitas ASN, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas ASN.
 - Sub Bidang Sertifikasi Jabatan ASN, mempunyai tugas Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi dan pelaporan dalam sertifikasi jabatan ASN.
 - Sub Bidang Jabatan Fungsional ASN, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan terhadap pembinaan jabatan fungsional bagi ASN.
- f. Bidang Pembinaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis dalam pembinaan ASN.

Bidang Pembinaan Pegawai mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan ASN;
- Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Pembinaan ASN;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Subbidang Penilaian, Evaluasi Kinerja, dan Penghargaan ASN;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Subbidang Kedudukan Hukum dan Disiplin ASN;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Subbidang Organisasi Profesi ASN;

- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penilaian, evaluasi kinerja, dan penghargaan ASN, kedudukan hukum dan disiplin ASN serta organisasi profesi ASN;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Pembinaan terdiri dari :

- Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Disiplin ASN, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasillitasi dan pelaporan terhadap kedudukan hukum dan disiplin ASN;
 - Sub Bidang Penilaian, Evaluasi Kinerja, dan Penghargaan ASN, mempunyai tugas Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi dan pelaporan terhadap penilaian, evaluasi kinerja dan penghargaan bagi ASN;
 - Sub Bidang Organisasi Profesi ASN, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi dan pelaporan organisasi profesi bagi ASN.
- g. UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis Badan Kepegawaian Daerah dibidang Penilaian Kompetensi Pegawai dan melaksanakan urusan ketatausahaan.

UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai;
- Pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang perencanaan, evaluasi, dan penilaian kompetensi pegawai;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai;
- Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai terdiri dari :

- Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasio dan pelaporan;
- Seksi Pengujian dan Penilaian, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta melaksanakan pengujian dan penilaian kompetensi pegawai;

- Seksi Pengembangan Instrumen, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengembangan instrument kompetensi pegawai.

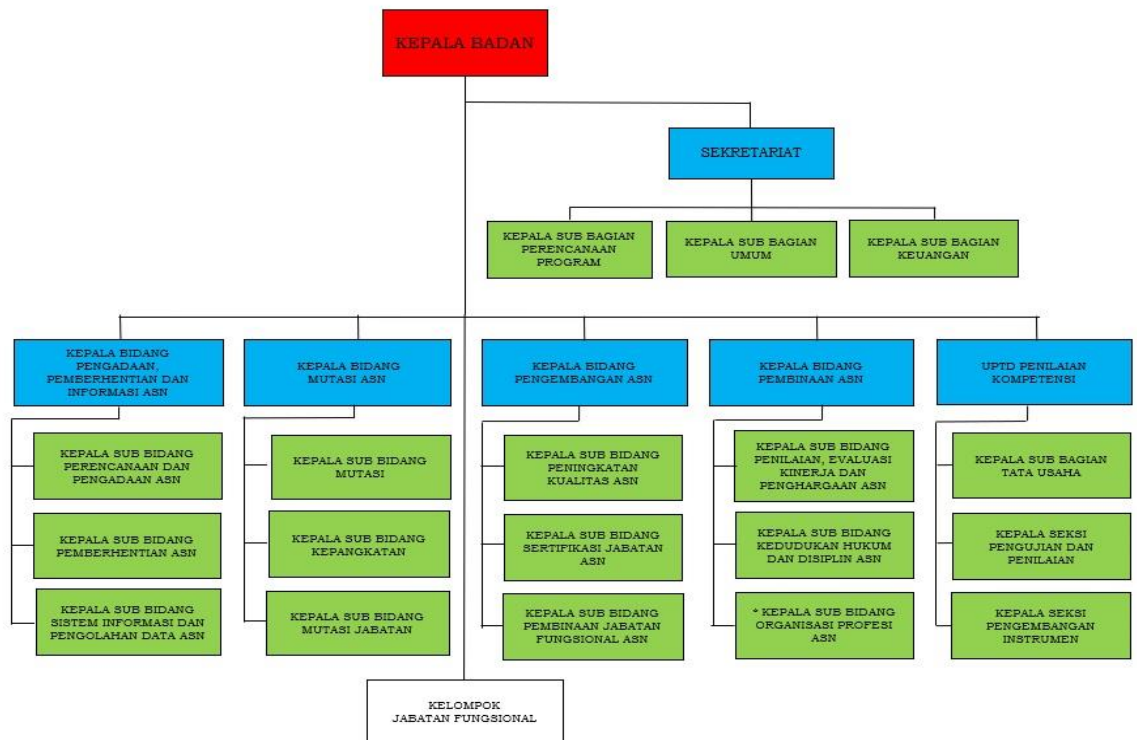
Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

C. Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Struktur Organisasi dan tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

- 1) Kepala BKD Prov. Kaltim
- 2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbag. Perencanaan Program
 - b. Subbag. Keuangan
 - c. Subbag. Umum
- 3) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN
 - a. Sub. Bidang Perencanaan dan Pengadaan ASN
 - b. Sub. Bidang Pemberhentian ASN
 - c. Sub. Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data ASN
- 4) Bidang Mutasi ASN
 - a. Sub. Bidang Mutasi
 - b. Sub. Bidang Kepangkatan
 - c. Sub. Bidang Mutasi Jabatan
- 5) Bidang Pengembangan ASN
 - a. Sub. Bidang Peningkatan Kualitas ASN
 - b. Sub. Bidang Sertifikasi Jabatan ASN
 - c. Sub. Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
- 6) Bidang Pembinaan ASN
 - a. Sub. Bidang Penilaian, Evaluasi Kinerja dan Penghargaan ASN
 - b. Sub. Bidang Kedudukan Hukum dan Disiplin ASN
 - c. Sub. Bidang Organisasi Profesi ASN
- 7) UPTD Penilaian Kompetensi
 - a. Sub. Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pengujian dan Penilaian
 - c. Seksi Pengembangan Instrumen

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Timur



Sumber Data : Struktur Organisasi BKD Prov. Kaltim Tahun 2021

D. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2021 mempunyai personil sebanyak 104 orang terdiri dari 25 pejabat struktural, 14 orang pejabat fungsional, 29 orang pejabat pelaksana, dan 36 orang tenaga kontrak.

Komposisi jabatan dalam struktur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2021 antara lain : 1 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 6 Jabatan Administrator, serta 18 Jabatan Pengawas.

Adapun rekapitulasi pegawai BKD Prov. Kaltim per Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai BKD Prov. Kaltim
Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan Tahun 2021

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki - Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JPT Pratama	1		1				1					
Administrator	3	2	4	1			4	1				
Pengawas	6	10	1	15				12	1			
Fungsional	5	10		14	1		3	11	4			
Pelaksana	17	14		26	5			23	2	6		
Tenaga Kontrak	29	7					1	12	3	15	1	4
PNS	32	36										
PNS + Tenaga Kontrak	61	43										
Jumlah	104	6	56	6	0	9	59	10	21	1	4	

Sumber data : BKD Prov. Kaltim per Desember 2021

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai *Center of Knowledge* dan *Learning Organization*. Komposisi jumlah pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan latar belakang pendidikan sarjana dan diploma lebih besar dibandingkan dengan yang bukan, secara signifikan diharapkan mampu memberikan andil yang cukup besar.

Tabel 1.2
Rekapitulasi PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana	8	1. Manajemen Keuangan = 1 2. Ilmu Adm. Negara = 4 3. Ilmu Adm. Publik = 1 4. Ekonomi Umum = 1 5. Psikologi Industri Organisasi = 1
2	Sarjana 1/ Diploma IV	47	1. Ilmu Jurnalistik = 1 2. Psikologi Umum = 5 3. Ekonomi Keuangan = 1 4. Ekonomi Manajemen = 1 5. Ekonomi Akuntansi = 2 6. Ilmu Adm. Negara = 5 7. Teknik Informatika = 1 8. Ilmu Komputer = 1 9. Sistem Informasi = 1 10. Manajemen Pembangunan = 3 11. Politik Pemerintahan = 7

			12. Manajemen Pemerintahan = 4 13. Ilmu Administrasi = 1 14. Ilmu Hukum = 2 15. Manajemen Informasi Komunikasi = 4 16. Keuangan Daerah = 7 17. Hubungan Internasional = 1
3	Diploma III	7	1. Ilmu Adm. Negara = 2 2. Adm Keuangan Daerah = 1 3. Teknik Informasi = 1 4. Teknologi Informasi = 2 5. Bahasa Inggris = 1
4	SLTA	6	
	JUMLAH	68	

Sumber Data : BKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Secara umum keberhasilan melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak terlepas dari peran aktif dari SDM Aparatur dilingkungan BKD Prov. Kaltim yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM Aparatur yang terampil, ahli, memiliki kemampuan dan kompeten serta berdayaguna.

E. Aspek Strategis Organisasi.

Kebutuhan akan pelayanan publik di Kalimantan Timur merupakan gambaran keinginan masyarakat terhadap kualitas kinerja birokrasi pemerintah yang memiliki implikasi luas pada aspek kehidupan bermasyarakat. Perbaikan kinerja pelayanan dibidang kepegawaian yang berkelanjutan akan mendorong terciptanya iklim kondusif bagi kegiatan penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur yang pada gilirannya akan memberikan kesejahteraan kepada Aparatur Sipil Negara.

Badan Kepegawaian Daerah dibentuk setelah pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999. Badan inilah yang berperan mengurus administrasi kepegawaian pada Pemerintah Daerah, baik Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi.

Sesuai tugas dan fungsinya, secara garis besar jenis pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada antara lain :

1. Pelayanan proses administrasi penetapan kenaikan pangkat PNS;
2. Pelayanan Mutasi Pindah PNS;
3. Pelayanan pemberian cuti PNS;
4. Pelayanan peninjauan masa kerja dan gaji PNS;
5. Pelayanan pemberian pensiun PNS dan pensiun janda/duda PNS;

6. Pelayanan penugasan PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan;
7. Pelayanan data dan informasi PNS;
8. Pelayanan penerbitan kartu pegawai;
9. Pelayanan penerbitan kartu istri/suami PNS;
10. Fasilitas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;
11. Pelayanan konsultasi, penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
12. Bimbingan kepegawaian;
13. Pelayanan administrasi lainnya dibidang kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Dengan 41 (empat puluh satu) jenis pelayanan kepegawaian sebagaimana terlampir**

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung Gubernur Kalimantan Timur didalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya dibidang kepegawaian, BKD Prov. Kaltim selalu berupaya untuk melaksanakan manajemen pengembangan SDM Aparatur secara strategis agar selalu tersedia SDM Aparatur unggulan yang selaras dengan dinamika perubahan misi Aparatur Sipil Negara maupun visi dan misi Gubernur yang tersurat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur.

Prioritas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Misi ke 5 (lima) yaitu “Berdaulat dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional, dan Berorientasi Pelayanan Publik”. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu instansi yang memiliki fungsi penunjang di bidang kepegawaian sepenuhnya mendukung pencapaian Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya menciptakan SDM Aparatur yang ideal sesuai dengan misi ke 5 tersebut.

Berdasarkan pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan berbagai upaya untuk mendukung pelaksanaan visi misi tersebut sebagai bentuk tanggungjawab dalam mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu-isu strategis di bidang kepegawaian hingga saat ini adalah sebagian besar pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut aparatur sipil negara (ASN) masih banyak yang membutuhkan peningkatan kompetensi baik teknis maupun manajerial dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya terutama terkait dengan pelayanan publik.

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Isu-Isu Strategis BKD Prov. Kaltim

Isu strategis yang dihadapi BKD		
Kalimat (-) "Masih...."	Kalimat (0)	Kalimat (+) "Perlunya...."
1. Lemahnya tatakelola /manajemen kepegawaian	1. Kualitas Tatakelola/ manajemen kepegawaian	1. Peningkatan Tatakelola /manajemen kepegawaian
2. Belum tetapnya Standar pelayanan kepegawaian	2. Kualitas Standar pelayanan kepegawaian	2. Peningkatan Standar pelayanan kepegawaian
3. Kurangnya Akuntabilitas pengelolaan kepegawaian	3. Kualitas Akuntabilitas pengelolaan kepegawaian	3. Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan kepegawaian
4. Lemahnya Pengawasan pengelolaan kepegawaian	4. Kapasitas Pengawasan pengelolaan kepegawaian	4. Peningkatan Pengawasan pengelolaan kepegawaian
5. Kurangnya Kualitas sumber daya aparatur	5. Kualitas sumber daya aparatur	5. Peningkatan Pengawasan pengelolaan kepegawaian
6. Kurangnya Kinerja aparatur	6. Kualitas Kinerja aparatur	6. Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur
7. Lemahnya Kapasitas kelembagaan pengelola kepegawaian	7. Kapasitas kelembagaan pengelola kepegawaian	7. Peningkatan Kinerja aparatur
8. Kurangnya Kebijakan dan sistem pengelolaan kepegawaian	8. Kapasitas Kebijakan dan sistem pengelolaan kepegawaian	8. Peningkatan Kapasitas kelembagaan pengelola kepegawaian
9. Lemahnya Kapasitas manajemen internal BKD	9. Kapasitas manajemen internal BKD	9. Peningkatan Kapasitas kelembagaan pengelola kepegawaian
10. Lemahnya Kapasitas sumber daya manusia BKD	10. Kapasitas sumber daya manusia BKD	10. Peningkatan Kebijakan dan sistem pengelolaan kepegawaian
11. Kurangnya Pengelolaan kepegawaian yang baik, bersih dan berwibawa.	11. Kapasitas Pengelolaan kepegawaian yang baik, bersih dan berwibawa.	11. Peningkatan Pengelolaan kepegawaian yang baik, bersih dan berwibawa.

Isu strategis yang dihadapi oleh BKD Prov. Kaltim pada masing-masing Bidang adalah sebagai berikut:

1. Isu strategis Dalam Perumusan Kebijakan Kepegawaian Daerah
 - a. Standar pelayanan kepegawaian
2. Isu strategis Dalam Pemberian dukungan terhadap Kebijakan Kepegawaian Daerah
3. Isu Strategis bidang Mutasi Pegawai :
 - a. Perencanaan Mutasi Umum Pegawai yang tepat guna dan Konsisten dalam pelaksanaannya.

- b. Adanya Digitalisasi Proses Mutasi Kepegawaian sehingga proses pelayanan kepegawaian dilakukan secara digital dan *lesspaper*;
 - c. Kemampuan peran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan pengembangan karir Pegawai dan Peningkatan kualitas pegawai didukung oleh aparatur yang handal dan sarana prasarana berdasarkan prinsip-prinsip good governance;
 - d. Optimalisasi Pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan karir Pegawai dan Peningkatan kualitas pegawai;
 - e. Penyempurnaan penerapan sistem merit yang berdasarkan 8 (delapan) aspek penilaian, dalam peningkatan sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Isu Strategis bidang Pengembangan ASN :
- a. Dapat menciptakan tenaga kepegawaian yang professional;
 - b. Kemampuan mewujudkan Penataan dan Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural/Fungsional secara Profesional sesuai Kompetensi;
 - c. Penerapan Kebijakan Manajemen Talenta yang bertujuan untuk menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan (future leader) dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi (core business);
5. Isu Strategis bidang Pembinaan ASN :
- a. Penguatan kerjasama lembaga baik horizontal maupun vertikal.
 - b. Pemantapan sosialisasi, Workshop dan Bimtek guna meningkatkan mutu Pegawai secara Profesional sesuai dengan kompetensi.
 - c. Mampu mewujudkan Pelayanan Kesejahteraan kepada PNS di lingkungan Pemprov. Kaltim.
 - d. Kemampuan untuk meningkatkan Disiplin PNS di Lingkungan Pemprov. Kaltim.
6. Isu Strategis bidang Perencanaan, Pengadaan, dan Informasi ASN :
- a. Pemantapan pengelolaan data dan informasi kepegawaian yang akurat dalam menunjang pembangunan E-Personal Sistem Kepegawaian dan Tata Naskah Kepegawaian
 - b. Kajian pembangunan E-Personal Sistem Kepegawaian dan Pengelolaan Tata Naskah berbasis E-File Sistem untuk peningkatan mutu, kualitas dan akuntabilitas dalam perencanaan;
 - c. Kemampuan mewujudkan pengadaan ASN berdasarkan perbandingan obyektif sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan;
 - d. Kemampuan mewujudkan Satu Data ASN mendukung penyusunan kebijakan ASN berbasis data.

7. Isu Strategis Kesekretariatan BKD

Dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyusun pilihan strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Faktor – faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.4
Analisis SWOT

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Organisasi sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor : 78 Tahun 2019 tentang SOTK BKD ; 2. Ketersediaan jumlah personil dan kapasitas kemampuan yang cukup memadai ; 3. Fasilitas yang dimiliki ; 4. Kerjasama yang solid dengan <i>stakeholders</i> yang sudah semakin meningkat. 5. Tersedianya database kepegawaian (Simpeg BKD Kaltim); 6. Tersedianya Sistem Absensi Online; 7. Tersedianya UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi sumber daya aparatur belum sesuai kompetensi pada masing-masing bidang ; 2. Belum terimplementasinya pembinaan pola karir ASN dalam menggambarkan alur pengembangan karir ASN ; 3. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil kajian strategis pembangunan dalam perencanaan pengembangan sumber daya manusia ; 4. Rendahnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini ; 5. Peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai jangka menengah belum sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja 6. Hasil penilaian sistem merit dilingkungan pemprov.kaltim masuk di kategori II “Kurang” 7. Belum terbangunnya integrasi sistem informasi database kepegawaian secara menyeluruh
Peluang	Ancaman/Tantangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pesatnya perkembangan teknologi informasi; 2. Tersedianya inovasi teknologi yang memadai ; 3. Adanya kerjasama regional se Kalimantan Timur yang sudah terjalin untuk keterpaduan perencanaan pembangunan ke tingkat Nasional; 4. Tersedianya Peraturan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi. 5. Sumber daya anggaran berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Timur; 6. Terbitnya PP 17 Tahun 2020 ttg manajemen PNS; 7. Terbitnya Permenpan 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta; 8. Penerimaan CPNS dan PPPK 2021 di pemprov.kaltim ; 9. Banyak PNS diluar pemprov kaltim / pns kab/kota dilingkungan pemprov kaltim masuk ke prov.kaltim ; 10. Permenpan RB Nomor 25 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi (berbasis kinerja & pemerintahan dinamis); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi perencanaan dan sistem penganggaran; 2. Belum efektifnya koordinasi antara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan ; 3. Adanya era disrupsi dan revolusi industri 4.0; 4. Penerapan sistem merit Kategori IV; 5. Penerapan Sistem Informasi ASN (Si-ASN) yang terintegrasi secara nasional 6. Penerapan Digitalisasi Mutasi Kepegawaian; 7. Pandemi Covid 19;

Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi, serta pengkajian strategis pembangunan dalam lima tahun ke depan (2019 - 2023) sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan fasilitas yang ada secara optimal dan meningkatkan sumber daya aparatur secara profesional dengan prinsip good governance (SO).

Strategi ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 dan Pergub Kaltim No. 78 Tahun 2019 tentang SOTK BKD Prov.Kaltim ;
 2. Memanfaatkan dan mengoptimalkan ketersediaan jumlah personil dan kapasitas kemampuan yang ada;
 3. Cakupan tuposi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi ;
 4. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki;
 5. Melaksanakan kegiatan dengan ketersediaan anggaran yang dikelola secara efektif dan efisien;
 6. Penyelenggaraan pelayanan kepegawaian berbasis digitalisasi;
 7. Penyelenggaraan peningkatan profesionalisme jabatan, kompetensi dan kinerja melalui Asessment Center;
 8. Peningkatan penyempurnaan penerapan sistem merit;
- b. Mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran yang handal, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipatif dan akuntabel (ST), dijabarkan sebagai berikut :
 1. Dokumen perencanaan dan kajian strategik pembangunan yang telah dihasilkan dan dimanfaatkan;
 2. Meningkatkan Keterpaduan/interaksi dengan Pemangku Kepentingan dan menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 3. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan sesuai dengan potensi sumber daya alam di Kalimantan Timur;
 4. Meningkatkan sistem penganggaran secara efektif, efisien, partisipatif dan transparan berbasis Teknologi;
 5. Pengembangan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi dengan pusat dan daerah;
 6. Pelaksanaan pemetaan penilaian potensi dan kompetensi seluruh ASN dilingkungan Pemprov.Kaltim untuk membangun manajemen talenta ASN;
 - c. Meningkatkan sosialisasi produk-produk perencanaan dan kajian strategis pembangunan serta keterlibatan *stakeholders* dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (WO) :

1. Memanfaatkan secara optimal hasil-hasil kajian strategis pembangunan dalam perencanaan pembangunan ;
 2. Mengisi jabatan fungsional Tenaga Perencanaan guna peningkatan kualitas dan peran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Mengoptimalkan pengelolaan data statistik dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini ;
 4. Meningkatkan sistem penganggaran secara efektif, efisien, partisipatif dan transparan berbasis Teknologi;
 5. Pelaksanaan pemetaan penilaian potensi dan kompetensi seluruh ASN dilingkungan Pemprov.Kaltim untuk membangun manajemen talenta ASN.
- d. Meningkatkan pengelolaan data statistik serta memperkuat koordinasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan (WT) :
1. Melakukan konsolidasi dan penyesuaian mandat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan ;
 2. Meningkatkan kuantitas basis statistik dan kajian pembangunan ;
 3. Menjaga konsistensi dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan;
 4. Meningkatkan kualitas penerapan sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN dilingkungan Pemprov.Kaltim.

G. Sarana dan Prasarana Kerja

Sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan tantangan kedepan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara bertahap telah menyiapkan sarana dan prasarana terutama sarana dan prasarana fisik gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta sarana penunjang lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana Kantor BKD Prov. Kaltim
Tahun 2021

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah Kantor BKD Jl. M. Yamin	2.880	m ²
2	Tanah UPTD Penkom Jl. Kartini	2.513	m ²
3	Bangunan Gedung BKD Jln. M. Yamin	4.231	m ²
4	Bangunan Gedung UPTD Penkom	1.848	m ²
5	Jumlah Lantai Gedung BKD	5	Lantai
6	Jumlah Lantai Gedung Assessment Center	3	Lantai
7	Lantai 1 Gedung BKD M.Yamin terdiri dari :		
	• Parkir	1	Area/Halaman
	• Ruang Kerja Bidang Dokinfo	1	Ruang
	• Toilet Lantai 1	2	Ruang
	• Ruang Pengairan	1	Ruang
	• Ruang Genset	1	Ruang
8	Lantai 2 Gedung BKD M.Yamin terdiri dari :		
	• Ruang Rapat	2	Ruang
	• Ruang Kerja Sekretariat	2	Ruang
	• Ruang Kerja Kepala BKD	1	Ruang
	• Ruang Tata Naskah	1	Ruang
	• Ruang Perpustakaan	1	Ruang
	• Ruang PABX	2	Ruang
	• Ruang Pantry	1	Ruang
	• Ruang Kontrol	1	Ruang
	• Musholla	1	Ruang
	• Toilet Lantai 2	2	Ruang
9	Lantai 3 Gedung BKD M.Yamin terdiri dari :		
	• Ruang Rapat	1	Ruang
	• Ruang Kerja Bidang Pengembangan	1	Ruang
	• Ruang Kerja Bidang Mutasi	1	Ruang
	• Ruang Pantry	1	Ruang
	• Toilet Lantai 3	2	Ruang
10	Lantai 4 Gedung BKD M.Yamin terdiri dari :		
	• Ruang Kerja Bidang PPI	1	Ruang
	• Ruang Kerja Bidang Pembinaan	1	Ruang
	• Ruang Kerja JFT	1	Ruang
	• Ruang Pantry	1	Ruang
	• Toilet Lantai 4	1	
11	Lantai 5 Gedung BKD M.Yamin terdiri dari :		
	• Ruang Makan	1	Ruang
	• Kantin	1	Ruang
	• Roof Top	1	Ruang
12	Lantai 1 UPTD Penkom terdiri dari :		

	• Ruang CAT	2	Ruang
	• Ruang Data/Monitor	1	Ruang
	• Ruang Tamu	1	Ruang
	• Ruang Arsip	1	Ruang
	• Toilet Lantai 1	2	Ruang
13	Lantai 2 UPTD Penkom terdiri dari :		
	• Ruang TU	1	Ruang
	• Ruang Kepala	1	Ruang
	• Ruang Pengawas	1	Ruang
	• Ruang Rapat	1	Ruang
	• Ruang Asessor	1	Ruang
	• Kamar	5	Ruang
	• Dapur	1	Ruang
	• Toilet Lantai 2	2	Ruang
	• Mushola	1	Ruang
14	Lantai 3 UPTD Penkom terdiri dari :		Ruang
	• Ruang Monitor	1	Ruang
	• Ruang Simulasi Individu	5	Ruang
	• Ruang FGD	2	Ruang
	• Musholla	1	Ruang
	• Ruang Makan	1	Ruang
	• Dapur	1	Ruang
	• Toilet Lantai 3	2	Ruang
15	Genset	2	unit
16	Alat Bengkel dan Alat Ukur	15	Unit
17	Alat Pertanian	21	Unit
18	Alat Angkutan		
	a. Kendaraan Roda 4	9	unit
	b. Kendaraan Roda 2	4	unit
19	Peralatan Kantor dan rumah tangga	1.415	unit
20	Alat Studio dan Alat Komunikasi	122	unit
21	Alat Keamanan	65	unit
22	Komputer PC	109	unit
23	Laptop/Note Book	69	unit
24	Printer	79	unit
25	Alat Laboraturium	36	unit
26	Alat Kedokteran	8	unit
27	Buku Perpustakaan	213	buku

Sumber Data : Inventaris BKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021
Per 31 Desember 2021

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Penetapan Visi dan Misi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks kehidupan bernegara, visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat *eksis*, *antisipatif* dan *inovatif*. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah tersebut.

Pencapaian rencana strategis, tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah tentu mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Adapun Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

**Berdaulat dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih,
Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik**

Berdasarkan misi tersebut diatas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan perangkat daerah dengan fungsi penunjang dalam melaksanakan visi misi Gubernur Kalimantan Timur, maka dari itu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan berbagai upaya untuk mendukung pelaksanaan misi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan misi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang dirumuskan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi berbasis kualifikasi dan kompetensi; 2. Terwujudnya pelayanan prima dibidang kepegawaian;

Sumber Data: Renstra BKD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023

Perumusan tujuan dan sasaran strategis ini juga akan memungkinkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengukur sejauh mana pencapaian misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja, strategi, kebijakan dan program/kegiatan yang terukur.

Tabel 2.1
Matriks Hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Sasaran
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja berbasis kompetensi	Skor Sistem Merit	0	0	255	270	277
		Indeks Profesionalitas ASN	0	0	47	55	60
2	Terwujudnya Pelayanan Prima dibidang kepegawaian	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (Survey SKM)	0	0	80	91	92

Sumber Data: Renstra Perubahan BKD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023

Adapun rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

Tabel 2.2
Matriks Program dan Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja berbasis kompetensi	Skor Sistem Merit	Skor	Program Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kompetensi ASN 2. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 3. Mutasi dan Promosi ASN 4. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah dikembangkan kompetensinya 2. Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya 3. Persentase ASN yang berkinerja baik 4. Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan 5. Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	Program Kepegawaian	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dikembangkan kompetensinya
2.	Terwujudnya pelayanan prima di bidang kepegawaian	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu 2. Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu 3. Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur 4. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 5. Jumlah laporan administrasi yang diselesaikan tepat waktu 6. Persentase barang layak pakai

Sumber Data : Renstra BKD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Sesuai dengan dokumen rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi yang berbasis kualifikasi dan kompetensi	Skor Sistem Merit	Berdasarkan Aspek penghitungan Indeks Sistem Merit yang ada pada Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN dilingkungan Instansi Pemerintah.	Laporan Bidang PPI, Pembinaan, Mutasi, Pengembangan	Bidang Mutasi ASN
		Indeks Profesionalitas ASN	Berdasarkan hasil pengukuran dari dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin yang sesuai pada Perka BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata cara & Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.	Laporan Bidang Pengembangan ASN	Bidang Pengembangan ASN
2	Terwujudnya pelayanan prima di bidang kepegawaian	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kepegawaian $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Laporan Sekretariat	Sekretariat

Sumber Data : IKU BKD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023

C. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuat Perjanjian Kinerja dengan para *Stakeholders* pada masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Perjanjian Kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja BKD Prov. Kaltim
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi yang berbasis kualifikasi dan kompetensi	Skor Sistem Merit	Skor	255
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	47
2.	Terwujudnya pelayanan prima di bidang kepegawaian	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	Nilai	80

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Kepegawaian	19.924.814.205,-	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.643.846.795,-	APBD

Sumber Data : Perjanjian Kinerja BKD Prov. Kaltim Tahun 2021

1) Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada tahun anggaran 2021, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 46.568.661.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 41.450.087.977,- (94,69%), dengan rincian untuk Belanja Langsung BKD Prov Kaltim Rp 38.378.803.544,- dengan capaian (94,37%) dan realisasi anggaran pada UPTD Penilaian Kompetensi Rp 3.105.696.385,- dengan capaian (98,89%)

2) Target Belanja BKD Prov. Kaltim

Adapun target belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Target Belanja BKD Prov. Kaltim
Tahun 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Langsung	46.568.661.000	41.450.087.977	94,69%

Sumber Data : Anggaran BKD Prov. Kaltim Tahun 2021

3) Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran startegis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis
BKD Prov. Kaltim Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi yang berbasis kualifikasi dan kompetensi	19.924.814.205	43%	Ditunjang melalui kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN ➤ Mutasi dan Promosi ASN ➤ Pengembangan Kompetensi ASN ➤ Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
2	Terwujudnya pelayanan prima di bidang kepegawaian	26.643.846.795	57%	Ditunjang melalui kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ➤ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ➤ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ➤ Administrasi Umum Perangkat Daerah ➤ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ➤ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sumber Data : BKD Prov. Kaltim Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang terkait dengan sasaran strategis serta peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran dituangkan melalui gambaran umum implementasi hasil evaluasi SAKIP dalam bentuk nilai, maka skala penilaian pengukuran yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Gambaran Umum Implementasi Hasil Evaluasi SAKIP

No	Nilai Capaian	Predikat Penilaian	Keterangan
1	0 s/d 30	D	Sangat Kurang
2	>30 s/d 50	C	Kurang
3	>50 s/d 60	CC	Cukup
4	>60 s/d 70	B	Baik
5	>70 s/d 80	BB	Sangat baik
6	>80 s/d 90	A	Memuaskan
7	>90 s/d 100	AA	Sangat Memuaskan

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Berikut adalah hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada BKD Prov. Kaltim sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP BKD Prov. Kaltim

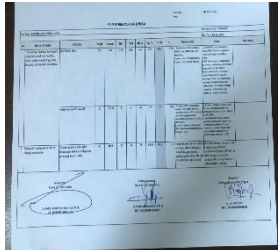
No	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Perencanaan Kinerja	30	25,93	25,93
2	Pengukuran Kinerja	25	20,00	20,00
3	Pelaporan Kinerja	15	12,14	11,65
4	Evaluasi Kinerja	10	7,27	7,27
5	Capaian Kinerja	20	14,03	11,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	79,36	76,09
	Predikat Penilaian		“BB” (Sangat Baik)	“BB” (sangat baik)

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Tahun 2020

2. Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

Evaluasi implementasi SAKIP pada BKD Prov. Kaltim mendapat rekomendasi terhadap kondisi BKD Prov. Kaltim untuk ditindaklanjuti dan segera melakukan rencana aksi dalam melaksanakan perbaikan dimasa yang akan datang. Adapun tindaklanjut atas hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tindaklanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Prov. Kaltim
Terhadap Laporan Hasil Evaluasi Sistem AKIP BKD Prov. Kaltim

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Rencana Aksi/ Keterangan
1	2	3	4
1.	<u>Perencanaan Kinerja</u> Meningkatkan kualitas dokumen rencana kegiatan tahunan dalam hal terkait target kinerja ditetapkan dengan baik dengan memonitor rencana aksi atas perjanjian kinerja	BKD telah melakukan perencanaan kegiatan tahunan atas kinerja yang ditetapkan dan telah melaksanakan reuiu terhadap rencana aksi atas perjanjian kinerja	Telah melakukan reuiu terhadap IKU BKD pada renstra perubahan tahun 2019-2023
2	<u>Pengukuran Kinerja</u> Memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran & dasar pemberian reward dan punishment sehingga digunakan untuk pengendalian & pemantauan kinerja	BKD telah melaksanakan koordinasi dan asistensi pengukuran kinerja kepada setiap unit kerja yang mendukung capaian indikator kinerja utama dan melakukan reuiu capaian secara berkala. Khususnya untuk monitoring dan evaluasi IKU pertriwulan.	Monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan per triwulan dan periodic. 
3	<u>Evaluasi Pelaporan</u> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas laporan kinerja terkait penyajian informasi keuangan yang terkait dengan sasaran kinerja instansi 	Kami telah meningkatkan laporan kinerja terkait penyajian informasi keuangan sesuai dengan sasaran kinerja program kegiatan yang telah dicapai	Informasi keuangan telah disajikan. Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja dan per program kegiatan/sub kegiatan
4	<u>Evaluasi Internal</u> Dengan melakukan pemantauan atas rencana aksi dalam rangka pengendalian dan alternative perbaikan kinerja setiap periode	BKD telah melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan serta rencana aksi secara periodik sesuai dengan rencana dan implementasi capaian kinerja masing-masing bidang. Pencapaian hasil evaluasi penilaian program menjadi dasar untuk menyusun target kinerja	Merencanakan sasaran dan target yang jelas dan terukur baik output maupun outcome. Menyelaraskan keterkaitan antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan secara terarah melalui cascading kinerja.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Rencana Aksi/ Keterangan
1	2	3	4
5	<p><u>Evaluasi capaian sasaran/kinerja</u></p> <p>Dalam pencapaian kinerja yang dilaporkan (output ataupun outcome) untuk tetap mengupayakan peningkatan pencapaian sasaran/kinerja organisasi secara optimal dengan target yang terukur sehingga dapat dicapai</p>	BKD telah melakukan revisi IKU Tahun 2021 yang selaras dalam RPJMD dan Renstra.	Merencanakan capaian kinerja yang dapat terukur dan dapat dicapai.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Berikut rincian keseluruhan pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), satuan, target, dan realisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja
Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim
Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi yang berbasis kualifikasi dan kompetensi	Skor Sistem Merit	Skor	255	TW.I	205	205	100 %
					TW.II	205	205	100%
					TW.III	245	245	100%
					TW.IV	255	256	103%
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	47	TW.I	0	0	100%
					TW.II	0	0	100%
					TW.III	45	41	91%
					TW.IV	47	47	100%
2	Terwujudnya pelayanan prima di bidang kepegawaian	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	Nilai	80	TW.I	50	50	100%
					TW.II	70	74	105%
					TW.III	75	74	98%
					TW.IV	80	83,91	105%

Sumber Data : hasil monev IKU per triwulan

Pada tabel 3.4 mengenai pengukuran capaian kinerja BKD Prov. Kaltim, secara umum berhasil tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan demikian capaian kinerja BKD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dapat dikategorikan baik. Oleh karena itu terhadap capaian kinerja yang tercapai, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus melakukan langkah konstruktif dan konkrit untuk mempertahankan, menganalisis dan mengevaluasi agar dimasa mendatang dapat mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih selama ini.

C. Analisis Capaian Kinerja

Pada akhir tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan dituangkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan di implementasikan melalui Rencana Aksi dalam menjalankan program dan kegiatan, adapun seluruh gambaran pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021;

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim pada tahun bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan antar Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Skor Sistem Merit	Skor	255	256	103%
2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	47	47	100%
3	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	Nilai	80	84	105%

Berdasarkan data diatas, perbandingan antara target dan realisasi dapat dilihat bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target di tahun 2021. Realisasi target Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dapat di kategorikan “sangat baik” dan kedepannya akan ditingkatkan. Pencapaian Skor Sistem Merit Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan hasil yang baik dan mendapatkan penghargaan dari instansi pusat atas pencapaian yang didapat.



- Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya;

BKD Prov. Kaltim pada periode ini telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BKD Prov. Kaltim tahun 2019-2023 dalam menghadapi tantangan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2019-2023.

Untuk lebih jelas lagi, perbandingan antara IKU terbaru dengan IKU tahun sebelumnya dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja periode 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Keterangan
			2019	2020	
1	2	3	4	5	$6=(5/4-1)*100$
1	Persentase SDM Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	%	84,19	97,3	13,11
2	Persentase Capaian Kinerja PNS diatas 80%	%	0	0	0
3	Persentase PNS yang didistribusikan dalam rangka penataan dan pemenuhan kebutuhan	%	10	6,23	3,77
4	Persentase Data Kepegawaian yang terupdate/terbarukan	%	100	100	0

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja periode 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Keterangan
			2021	
1	2	3	5	6
1	Skor Sistem Merit	Skor	255	
2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	47	
3	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	Nilai	80	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa informasi kinerja yang disajikan berbeda dan tidak dapat membandingkan realisasi tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya. Sasaran dan indikator pada tahun 2021 menyesuaikan dengan *core business* kepegawaian saat ini dan menyesuaikan dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan BKD Prov.Kaltim Tahun 2019-2023.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran startegis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan. Perbandingan realisasi kinerja BKD Prov. Kaltim tahun 2021 dengan Rencana Startegis (Renstra) BKD Prov. Kaltim periode 2019-2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Skor Sistem Merit	Skor	255	256	103%
2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	47	47	100%
3	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	Nilai	80	84	105%

Pada tabel 3.8, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama (IKU) BKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 seperti yang tertera pada tabel diatas menunjukkan rata-rata hasil capaian yang didapat sebesar 95%. Hal ini tentu akan menjadi bahan acuan dalam menentukan target dan langkah –langkah dalam pencapaian target ditahun berikutnya pada Renstra.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

a) Sasaran Strategis I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi yang berbasis kualifikasi dan kompetensi	Skor Sistem Merit	Skor	255	256	103%
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	47	47	100%

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada sasaran strategis I terdapat indikator kinerja antara lain :

1. Skor Sistem Merit

Untuk mengukur implementasi keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja utama tersebut, terdapat parameter pengukuran antara lain :

- ❖ Berdasarkan Aspek penghitungan Indeks Sistem Merit yang ada pada Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN dilingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam melakukan analisa terhadap capaian Skor Sistem Merit pada Tahun 2021, dibawah ini akan sebutkan beberapa hal terkait pencapaian Skor Sistem Merit tahun 2021.

Pada Tahun 2021, BKD Provinsi Kalimantan Timur menargetkan capaian atas Skor Sistem Merit sebesar 265 poin. Adapun dari hasil penilaian Perka KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dilingkungan Instansi Pemerintah, maka diperoleh nilai Skor Sistem Merit Provinsi Kalimantan Timur sebesar **256** poin dengan kategori “baik” serta dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9
Rincian Pencapaian per Aspek
Skor Sistem Merit Tahun 2021 Pemprov.Kaltim

No	Aspek	Realisasi Tahun 2021
1	Perencanaan Kebutuhan	35
2	Pengadaan	32
3	Pengembangan Karier	62,5
4	Promosi dan Mutasi	17,5
5	Manajemen Kinerja	45
6	Penggajian, Penghargaan dan disiplin	30
7	Perlindungan dan Pelayanan	16
8	Sistem Informasi Kepegawaian	18
Total Keseluruhan		256

2. Indeks Profesionalitas ASN

Untuk mengukur implementasi keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja utama tersebut, terdapat parameter pengukuran antara lain :

- ❖ Berdasarkan hasil pengukuran dari dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin yang sesuai pada Perka BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata cara & Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Dalam melakukan analisa terhadap capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021 sesuai dengan Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019, yang merupakan aspek dalam pemenuhan Indeks Profesionalitas ASN sebagai berikut :

Tabel 3.10
Rincian Per Aspek
Indeks Profesionalitas ASN Pemprov.Kaltim

No	Aspek	Realisasi Nilai
1	Kualifikasi	12,96
2	Kompetensi	8,96
3	Kinerja	19,91
4	Disiplin	4,99
TOTAL		47

Dapat dilihat dari tabel 3. Bahwa penilaian Indeks Profesionalitas ASN pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan nilai dengan indeks 47 dari target yang telah ditetapkan dengan nilai indeks 47 sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%. Hal ini terjadi dikarenakan penilaian indeks profesionalitas ASN secara nasional menurun akibat puncak pandemi Covid-19 pada tahun 2020, kurangnya kesadaran PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tertib administrasi kepegawaian dengan memperbaharui dokumen pada aplikasi SIMPEG BKD Kaltim secara khusus terhadap peningkatan kompetensi yang telah diperoleh dan masih kurangnya penyelenggaraan diklat kepada PNS untuk memenuhi persyaratan kompetensi PNS minimal 20(dua puluh) Jam Pelajaran dalam 1 (satu) Tahun sesuai amanat PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil, serta adanya perpindahan data pegawai pada aplikasi SAPK ke SIASN BKN.

Sampai dengan akhir tahun 2021, realisasi sasaran strategis I dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Indikator Skor Sistem Merit pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2020 masuk pada kategori II dengan predikat “kurang” dengan nilai 245, kemudian pada Tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan Skor Sistem Merit Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 265 dan masuk ke kategori baik sehingga akhir tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan penghargaan dari Komisi Aparatur Negara pada kegiatan Meritokrasi Tahun 2021 dengan nilai skor sebesar 256 dan masuk ke kategori III dengan predikat “Baik”. Sehingga capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 103% dengan hasil sangat memuaskan.



2. Indeks Profesionalitas ASN merupakan suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan kunci keberhasilan dalam mendukung profesionalitas ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun parameter dalam mengukur Indeks Profesionalitas ASN diatur dalam Peraturan BKN RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Dari target kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan indeks dengan nilai sebesar 47 dari target yang ditetapkan dengan indeks nilai sebesar 47. Sehingga capaian kinerja target yang ditetapkan sebesar 100 %.

Adanya Pandemi Covid-19 dari Tahun 2020 hingga 2021 menyebabkan tingkat IP ASN di seluruh Indonesia menurun sampai dengan 20%.

Alternatif solusi yang akan dijalankan dalam mendukung pelaksanaan peningkatan IP ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan selalu melakukan update secara berkala setiap pegawai yang menyelesaikan pelatihan kepemimpinan, pelatihan fungsional, pelatihan kepemimpinan, pelatihan fungsional, pelatihan teknis maupun kegiatan lain yang mendukung pengembangan kompetensi seperti seminar, workshop, bimbingan teknis dan kegiatan lain yang sejenis pada aplikasi SIMPEG BKD Kaltim dan di SAPK BKN.

Dari hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa realisasi pada sasaran strategis I dapat dikatakan “berhasil” dalam pelaksanaannya.

b) Sasaran Strategis II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
2	Terwujudnya pelayanan prima di bidang kepegawaian	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	Nilai	80	84	105%

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada sasaran strategis II terdapat indikator kinerja antara lain :

3. Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Survey Kepuasan Masyarakat) terhadap Pelayanan Kepegawaian.

Untuk mengukur implementasi keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja utama tersebut, terdapat parameter pengukuran sebagai berikut :

- ❖ Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kepegawaian, dengan menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total Nail Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times 100\%$$

Dalam menunjang pencapaian indikator kinerja utama tersebut, dilakukan upaya dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Indeks Kepuasan Pelayanan (IKP) kepada pengguna layanan, dalam hal ini layanan kepegawaian BKD Provinsi Kalimantan Timur kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, dengan rincian Skor/Nilai sebagai berikut :

Tabel 3.11

**Rata-Rata Skor dan Peringkat pada Pengguna Layanan
BKD Prov.Kaltim**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
U1	Pelayanan Administrasi	86,25	A SANGAT BAIK
U2	Kemudahan mendapatkan informasi Kepegawaian	85,00	A SANGAT BAIK
U3	Keadilan dalam mendapatkan layanan kepegawaian	83,75	A SANGAT BAIK
U4	Kemudahan koordinasi dan konsultasi kepegawaian	85,00	A SANGAT BAIK
U5	Layanan pengaduan	80,00	B BAIK
U6	Kualitas Pelayanan BKD Prov. Kaltim secara keseluruhan	85,00	A SANGAT BAIK
U7	Layanan Fasilitasi Ujian Dinas	82,50	A SANGAT BAIK
U8	Layanan fasilitasi proses kenaikan pangkat	83,75	A SANGAT BAIK

Berdasarkan hasil analisis data terhadap penelitian Indeks Kepuasan Pelayanan (IKP) pengguna layanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur berada pada kategori “Sangat Baik” dengan Nilai Unsur pelayanan sebesar 83,91 dengan pembulatan dengan nilai 84, sebagai rincian berikut :

Tabel 3.12

Indeks Kepuasan Pelayanan BKD Provinsi Kalimantan Timur

No. Res	Nilai Unsur Pelayanan								Total
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	3	4	4	4	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	3	4	
5	3	3	3	4	3	3	3	3	
6	3	2	3	3	2	3	3	3	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	
8	3	3	3	2	3	2	2	3	
9	3	3	3	4	3	3	3	3	
10	3	3	3	3	2	3	3	3	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	
12	3	3	3	3	2	3	3	2	
13	3	3	3	2	3	3	3	3	
14	3	4	3	4	3	3	3	3	
15	3	3	3	2	2	3	3	3	
16	4	4	4	3	4	3	3	3	
17	3	3	3	4	3	3	3	3	
18	3	3	3	2	4	4	4	4	
19	4	3	3	4	3	4	3	3	
20	4	4	3	4	3	4	3	3	
21	3	3	3	3	4	3	4	4	
NRR/Unsur	3.45	3.40	3.35	3.40	3.20	3.40	3.30	3.35	
NRR Tertimbang	0.43	0.43	0.42	0.43	0.40	0.43	0.41	0.42	3.36
Nilai IKM									83.91

Sampai dengan akhir tahun 2021, realisasi sasaran strategis II dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kab/Kota , target kinerja tahun 2021 dengan nilai 80 terealisasi capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2021 dengan nilai 84 sehingga capaian presentase kinerja yang diperoleh sebesar 105 % dengan hasil “Sangat Baik”.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan upaya untuk memperbaiki pelayanan publik kepada pengguna layanan kepegawaian sesuai yang telah ditargetkan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Dari hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa realisasi pada sasaran strategis II dapat dikatakan “berhasil” dalam pelaksanaannya.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Secara umum kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Prov. Kaltim pada tahun 2021 telah terlaksana dengan optimal. Hal ini tentunya patut mendapat apresiasi khusus dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian kinerja Badan mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan baik, sehingga menghasilkan suatu prestasi dalam pencapaian target kinerja pada BKD Prov. Kaltim.

Adapun strategi dan langkah-langkah yang digunakan dalam mendukung pencapaian kegiatan serta indikator kinerja kegiatan yang dituangkan kedalam rencana aksi BKD Prov. Kaltim sebagai berikut:

Tabel 3.13
Rencana Aksi dalam mendukung kegiatan BKD Prov. Kaltim

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Rencana Aksi
Pengembangan Kompetensi ASN	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Presentase Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpasing dan promosi	72 %	117%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pengangkatan dalam jabatan fungsional 2. Asistensi usul jabatan fungsional 3. Pelantikan Jabatan fungsional; 4. Pemukthariran data pemangku jabatan fungsional setiap PD 5. Sosialisasi pergub jabatan fungsional
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang diusulkan melaksanakan diklat structural/diklat prajabatan, diklat fungsional dan diklat teknis lainnya	435 PNS	674 PNS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan BPSDM/LAN terkait usulan pelaksanaan diklat 2. Pengembangan sistem informasi terkait pelaksanaan diklat 3. Monitoring pasca diklat sebagai bahan evaluasi
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Presentase jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, fungsional dan pelaksana yang tersertifikasi	13 %	13 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan dasar hukum penyelenggaraan sertifikasi ASN 2. Melakukan pendataan, validasi dan pemetaan sertifikasi ASN sesuai Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas 3. Penyusunan rencana kebutuhan sertifikasi jabata pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan jabatan fungsional 4. Akselerasi dan afirmasi sertifikasi ASN

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Rencana Aksi
Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah PNS yang mengikuti pengukuran dan penilaian kompetensi pegawai	200 PNS	209 PNS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kompetensi dan potensi ASN 2. Penyampaian umpan balik/feed back kepada peserta 3. Fasilitasi pengukuran kompetensi untuk ASN Pemkab/Pemkot 4. Study Komparasi pengembangan instrument 5. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil penilaian kompetensi 6. Pelatihan assessor SDM Aparatur 7. Pengelolaan database peserta yang telah mengikuti pengukuran 8. Fasilitasi seleksi terbuka (job fit evaluation) kab/kota dan provinsi
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pembinaan Disiplin ASN	Presentase tingkat kehadiran PNS	98 %	99 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi kehadiran pegawai 2. Merancang draft pergub tentang daftar hadir 3. Monitoring dan evaluasi kehadiran terkait penerapan SAO
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase PNS yang mencapai target kinerja diatas 80% berdasarkan nilai SKP dengan kriteria "Baik"	70 %	75 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rancangan pergub kaltim tentang sistem e-kinerja 2. Melakukan sosialisasi SKP sesuai Permenpan RB No.8 tahun 2021 3. Penyerahan Penghargaan bagi PNS 4. Koordinasi tindak lanjut e kinerja
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah laporan kegiatan seni budaya, MTQ, keolahragaan, dan bantuan hukum	6 Laporan	6 Laporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi Peserta MTQ 2. Pelaksanaan MTQ 3. Pelatihan anggota Korps Musik 4. Sosialisasi bantuan hukum ASN 5. Pelaksanaan pengukuhan BP Bapor 6. Pelaksanaan Musda KORPRI

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Rencana Aksi
Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Presentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/ Kota/ Provinsi/ Kementerian diluar Prov Kaltim ke Pemprov Kaltim	80 %	80%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merevisi Pergub tentang Mutasi Pegawai. 2. Monitoring dan evaluasi pra mutasi pegawai. 3. Pelaksanaan medical checkup, tes MMPI, dan uji kompetensi dan potensi serta wawancara. 4. Koordinasi dengan Biro Organisasi terkait formasi jabatan
		Presentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota diwilayah Prov Kaltim ke Pemprov Kaltim	79 %	79 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merevisi Pergub tentang Mutasi Pegawai. 2. Monitoring dan evaluasi pra mutasi pegawai. 3. Pelaksanaan medical checkup, tes MMPI, dan uji kompetensi dan potensi serta wawancara. 4. Koordinasi dengan Biro Organisasi terkait formasi jabatan
	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas	85 %	91 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rapat Baperjakat. 2. Inventarisasi Jabatan kosong. 3. Melaksanakan rotasi dan promosi jabatan.
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	850 SK	886 SK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan aplikasi Kenpa 2. Sosialisasi aplikasi Kenpa 3. Sosialisasi Kepangkatan 4. Penyerahan SK Kenaikan Pangkat Apri 5. Evaluasi Kenaikan Pangkat
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian	Presentase Pemutakhiran data kepegawaian	100 %	100 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi dan peremajaan data kepegawaian. 2. Pengembangan dan pemeliharaan sistem.
	Koordinasi Pelaksanaan	Presentase Usulan pemberhentian dan	100 %	100 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada PD terkait pengusulan pemberhentian

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Rencana Aksi
	Administrasi Pemberhentian	pension yang terselesaikan			<ol style="list-style-type: none"> 2. Inventarisasi/Rekap Data pemberhentian 3. Proses verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data ke SAPK 4. Penerbitan Perteg Pemberhentian/Pensiun di BKN 5. Penerbitan SK Pemberhentian/Pensiun
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan seleksi CASN, Sumpah Janji, UDI/ UPI	3 laporan	3 Laporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pelaksanaan seleksi PPPK/CASN dilingkungan Pemprov.Kaltim 2. Penyusunan dan Penginputan e Formasi 3. Penerbitan SK PPPK/CASN 4. Pelaksanaan Ujian dinas

Analisa faktor keberhasilan :

1. Sasaran Strategis I :
 - a. Skor Sistem Merit
 - b. Indeks Profesionalitas ASN

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama terdapat beberapa analisis dalam menggapai keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- Melaksanakan perencanaan kinerja dan konsistensi terhadap rencana aksi dalam mendukung sasaran strategis I;



Dokumentasi kegiatan Rapat Perencanaan Kinerja

- Optimalisasi pelaksanaan kegiatan utama dengan berkoordinasi pihak terkait;



Dokumentasi kegiatan Utama Pendukung Capaian Sasaran Strategis I



Dokumentasi Pemberian Penghargaan Meritokrasi Tahun 2021 oleh KASN



Rapat Pembahasan IP ASN dilingkungan Pemprov.Kaltim



Penginputan aspek Indeks Profesionalitas ASN dilingkungan Pemprov.Kaltim

- Melaksanakan evaluasi secara periodik terhadap hasil capaian kinerja.



Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja

- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan

Kode Duk : FPM-SKT-004.01
Revisi : 0

MONITORING CAPAIAN KINERJA

Unit Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Periode Analisa : Triwulan IV
Hari/Tgl : 3 Januari 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	%	Permasalahan	Solusi	Keterangan
1	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi yang berbentuk kualifikasi dan kompetensi	Skor Sistem Merit	255	Skor	201	205	245	256	256	103%	1. Sistem dengan perantara ANAS dan ASK, serta sistem yang telah diintegrasikan. 2. Sistem dengan perantara ANAS dan ASK. 3. Sistem dengan perantara ANAS dan ASK.	1. ANAS & ASK, yang akan terus dibina dan dikembangkan yang sesuai dengan perkembangan teknologi. 2. RENCANA melakukan pelatihan pada hari-hari libur untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial ASN. 3. RENCANA melakukan pemertanian pada hari-hari libur untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial ASN. 4. RENCANA melakukan pelatihan pada hari-hari libur untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial ASN. 5. RENCANA melakukan pelatihan pada hari-hari libur untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial ASN.	
		Indeks Profesionalitas ASN	47	Indeks	0	0	41	47	47	100%	1. Penilaian untuk ID menyatakan bahwa ID akan dilakukan secara berkala. 2. Survei kepuasan PNS untuk meningkatkan kompetensi ASN. 3. Melakukan pelatihan pada hari-hari libur untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial ASN. 4. Melakukan pelatihan pada hari-hari libur untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial ASN. 5. Melakukan pelatihan pada hari-hari libur untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial ASN.	1. BPD akan melakukan pembinaan kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi. Melakukan pelatihan pada hari-hari libur untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial ASN. 2. Melakukan pelatihan pada hari-hari libur untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial ASN. 3. Melakukan pelatihan pada hari-hari libur untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial ASN. 4. Melakukan pelatihan pada hari-hari libur untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial ASN. 5. Melakukan pelatihan pada hari-hari libur untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial ASN.	
2	Terwujudnya pelayanan prima di bidang kepegawaian	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	80	Nilai	50	74	80	83,69	83,69	105%	Pandemi Covid-19 menyebabkan kurangnya aktifitas pelayanan yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM) dan telah mengakibatkan menurunnya tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM) dan telah mengakibatkan menurunnya tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM).	BKD telah membuat surat undangan ke masing-masing PNS terkait pemertanian pelayanan SKM BKD dan telah melaksanakan forum diskusi dengan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) ke Kabupaten.	

Mengetahui
Kepala BKD Prov. Kaltim,

Drs. Dedy Rusdiansyah Anan Dani, M.M.
NIP. 196406271980031008

Peranggungjawaban
Sekretaris BKD Prov. Kaltim,

Hj. Rokiana Hectawati, S.S.M.Si
NIP. 19720908198032012

Ditandatangani
Keuangan dan Manajemen Program,

Art Saanti S. Kera
NIP. 197504062006040201

2. Sasaran Strategis II :

Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (Survey Kepuasan Masyarakat)

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama terdapat beberapa analisis dalam menggapai keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- Melaksanakan perencanaan kinerja dan konsistensi terhadap rencana aksi dalam mendukung sasaran strategis II;



- Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat ke perangkat daerah dengan mengedarkan surat permohonan pengisian SKM terkait pelayanan kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
"Seasi Untuk Kalimantan Berkeadilan"
Jalan Muhammad Yamin Nomor 1 Samarinda
Telp: (0541) 742549 Fax: (0541) 743225
Website : www.bkd.kaltimprov.go.id Email: bkd@kaltimprov.go.id

Samarinda, 1 Oktober 2021

K e p a d a

Nomor : 800/L.2-8324/BKD
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**


Yth. **terlamsit**
d-
Tempat

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur, diuntut memberikan pelayanan prima dibidang kepegawaian kepada seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai bentuk evaluasi terhadap pelayanan kepegawaian maka BKD Prov.Kaltim melakukan survey untuk melihat seberapa puas publik menilai pelayanan yang diberikan. Kami bersedia bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berkenan mengisi kuisioner SKM BKD Prov.Kaltim melalui link berikut : <https://bit.ly/skmktd2021> paling lambat hingga 8 Oktober 2021.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala



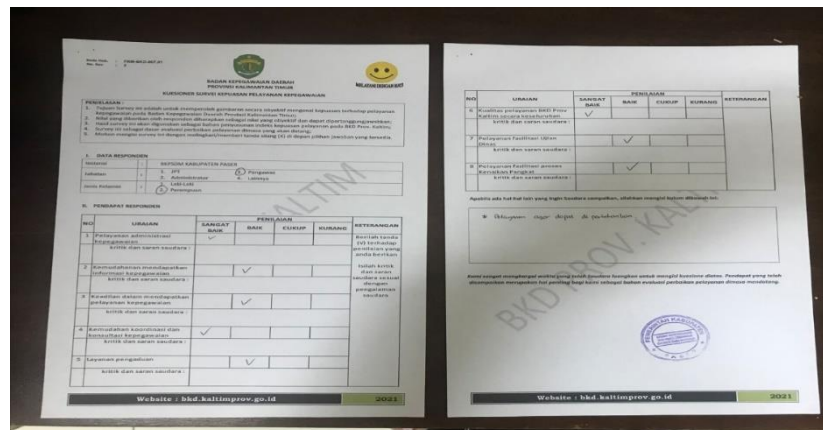
Lampiran Surat Kepala BKD Prov.Kaltim
Nomor: 800/L.2-8324/BKD

Kepada Yth :

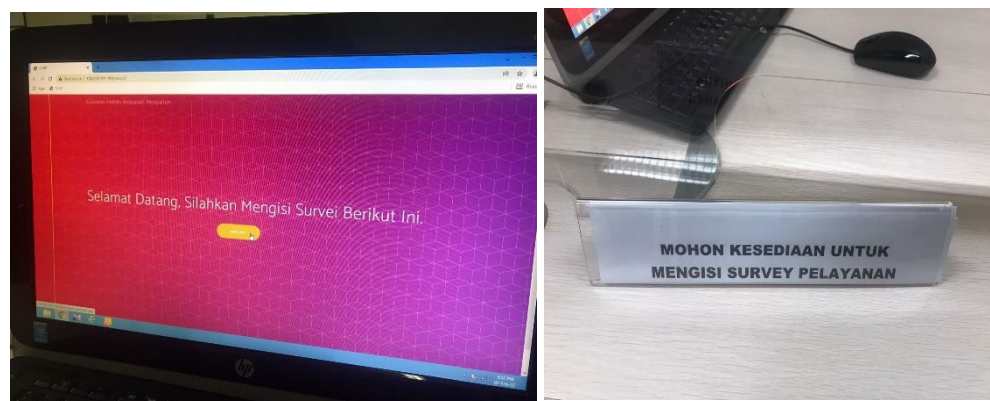
1. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov.Kaltim
2. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov.Kaltim
3. Kepala Biro Hukum Setda Prov.Kaltim
4. Kepala Biro Organisasi Setda Prov.Kaltim
5. Kepala Biro Administrasi Perencanaan Setda Prov.Kaltim
6. Kepala Biro Ekonomi dan Keuangan Setda Prov.Kaltim
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov.Kaltim
8. Kepala Biro Umum Setda Prov.Kaltim
9. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov.Kaltim
10. Kepala Badan Pengawasan Daerah Prov.Kaltim
11. Kepala Badan Penghubung Jakarta
12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
14. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
15. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
16. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
18. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19. Kepala Dinas Kesehatan
20. Kepala Dinas Sosial
21. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22. Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
24. Kepala Dinas Pembastisinaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
25. Kepala Dinas Perhubungan
26. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
27. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah
28. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
29. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
31. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
32. Kepala Dinas Kebudayaan
33. Kepala Dinas Perkebunan
34. Kepala Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan
35. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
36. Kepala Dinas Pariwisata
37. Kepala Dinas Bangko, Tanaman Pangan dan Hortikultura
38. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang & Escun, Rakyat
39. Inspektur Prov.Kaltim
40. Sekretaris DPRD Prov. Kaltim
41. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
42. Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie
43. Direktur RSUD DR. Mansjono Djemberhowo
44. Direktur RSUD Alim Husada Mahakam

Surat Permohonan Pengisian SKM ke Perangkat Daerah diling. Pemprov Kaltim

- Melakukan pengisian kuesioner ke BKPP/ BKPSDM kab/kota se-Kalimantan Timur terkait pelayanan kepegawaian BKD Provinsi Kalimantan Timur;



Formulir Kuesioner Survey Kepuasan Pelayanan
Dokumentasi kegiatan Utama Pendukung Capaian Sasaran Strategis II



- Melaksanakan evaluasi secara periodik terhadap hasil capaian kinerja

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input.

Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim pada tahun 2021 telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.14
Hasil Perbandingan Output dan Input dengan Standar Efisiensi
BKD Prov. Kaltim Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	4	5	6 (4-5)
1	Skor Sistem Merit	100	93,49	6,51
2	Indeks Profesionalitas ASN	100	99,41	0,56
3	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (Survey Kepuasan Masyarakat)	100	84,61	15,39

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan
BKD Prov. Kaltim

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	%	Total APBD		Jumlah Prog/Keg yang dialokasikan		Total Program / Kegiatan		Ket
					BL	BTL	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2019	35.916.135.262	27,407,070,963.98	8,509,064,298.02	76.31	26,035,000,000	9.881.135.262	5	24	5	24	APBD
2020	34.450.519.415	30.532.062.972	3.918.456.443	88.63	23.265.036.415	11.185.483.000	8	19	8	19	APBD
2021	46.568.661.000	41.450.087.977	5.118.573.023	89.01	32.001.250.160	14.567.410.840	10	23	10	23	APBD

D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini disajikan realisasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja :

Untuk pencapaian target kinerja tahun 2019 sesuai dengan Perjanjian Kinerja, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai 3 Sasaran Strategis yang harus dilaksanakan, antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi yang berbasis kompetensi	Skor Sistem Merit	255	256	103	15.191.509.103	14.202.620.657	93,49
		Indeks Profesionalitas ASN	47	47	100	4.733.305.102	4.705.256.282	99,41
2	Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaia	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (Survey SKM)	80	84	105	26.643.846.795	22.542.211.038	84,61
Jumlah						46.568.661.000	41.450.087.977	89,01

2. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan :

Adapun realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim tahun 2021 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan
Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Ket
		Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	390.000.000	389.269.447	99,81	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	49.997.985	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	340.000.000	339.271.462	99,79	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.567.410.840	11.712.999.457	80,41	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.567.410.840	11.712.999.457	80,41	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	362.940.000	321.433.000	88,56	APBD
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	318.140.000	316.883.000	99,60	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44.800.000	4.550.000	10,16	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.701.849.500	1.595.444.925	93,75	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	359.400.000	354.191.259	98,55	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.342.449.500	1.241.253.666	92,46	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.022.398.087	2.574.959.712	85,20	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.022.398.087	2.574.959.712	85,20	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.884.778.600	3.522.937.226	90,69	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.664.500	19.330.588	46,40	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.843.114.100	3.503.606.638	91,17	
7	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3.344.259.050	2.997.350.182	89,63	APBD
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah	1.000.000.000	997.652.987	99,77	

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Ket
		Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	353.600.000	307.534.820	86,97	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1.383.307.050	1.085.495.970	78,47	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	607.352.000	606.666.405	99,89	
	Mutasi dan Promosi ASN	1.648.402.500	1.533.118.468	93,01	APBD
	Pengelolaan Mutasi ASN	489.965.000	467.767.113	95,47	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	533.437.500	520.648.708	97,60	
	Pengelolaan Promosi ASN	625.000.000	544.702.647	87,15	
	Pengembangan Kompetensi ASN	5.342.555.102	5.292.972.137	99,07	APBD
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	236.250.000	218.655.600	92,55	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	4.733.305.102	4.705.256.282	99,41	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	373.000.000	369.060.255	98,94	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8.935.388.053	8.438.318.990	94,44	APBD
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8.585.938.053	8.130.257.824	94,69	
	Pembinaan Disiplin ASN	349.450.000	308.061.166	88,16	
UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI PROV. KALTIM					
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.800.000	88.297.000	95,15	APBD
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.400.000	12.397.000	99,98	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.400.000	75.900.000	94,40	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.500.342.500	1.332.442.105	88,81	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	926.542.500	791.686.999	85,45	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	573.800.000	540.755.106	94,24	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.032.228	502.953.498	84,95	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	592.032.228	502.953.498	84,95	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	529.295.040	501.474.668	94,74	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	1.811.300	521.000	28,76	

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Ket
		Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	527.483.740	500.953.668	94,97	
5	Pengembangan Kompetensi ASN	654.209.500	646.117.162	98,76	APBD
	Pengelolaan Assessment Center	654.209.500	646.117.162	98,76	
	Total Belanja Langsung	46.568.661.000	41.450.087.977	89,01	

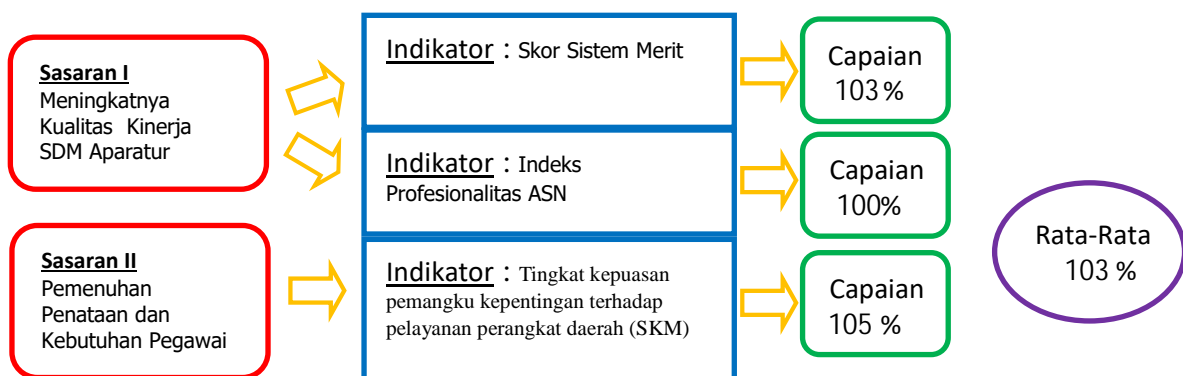
BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja BKD Prov. Kaltim

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2021. Laporan kinerja ini meliputi pelaksanaan program dan kegiatan yang prioritas pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian daerah, sesuai dengan Perencanaan Strategis yang telah ditetapkan dan diwujudkan kedalam Indikator Kinerja Utama BKD Provinsi Kalimantan Timur.

Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Kaltim yang mempunyai tugas membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan manajemen kepegawaian serta melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal, maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sumber Dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data serta informasi yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim, berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja BKD Prov. Kaltim dapat dilihat pada skema berikut :



Dari skema tersebut diatas, capaian rata-rata kinerja BKD Prov. Kaltim Tahun 2021 sebesar 95%. Bila dibandingkan dengan realisasi keuangan yang menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada skema berikut :



Jadi dapat diambil kesimpulan untuk efisiensi Penggunaan Anggaran Sebesar 0,31%.



Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kinerja yang optimal, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan "**Kategori Sangat Baik**".

B. Strategi Peningkatan Kinerja di masa yang akan datang

Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang antara lain :

1. Meningkatkan penyempurnaan penerapan sistem merit pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan membangun talent pool berdasarkan pada kompetensi (potensi) dan kinerja pegawai;
2. Membangun rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan ;
3. Melaksanakan analisis permasalahan kinerja yang berdasarkan pada hasil penilaian kinerja, agar dapat tercapainya target tujuan organisasi dan dapat menutup GAP capaian kinerja yang ada;
4. Meningkatkan pelayanan kepegawaian prima dengan profesional terhadap masyarakat/ASN sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian melalui proses yang cepat, tepat, murah dan terintegrasi dengan didukung peraturan yang berlaku.
5. Melakukan sosialisasi mengenai 4 (empat) aspek Indeks Profesionalitas ASN seperti kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin kepada ASN dan pentingnya tertib administrasi kepegawaian khususnya pada SIMPEG dan SAPK, serta bekerjasama dengan pihak BPSDM, LAN dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan diklat teknis, manajerial, sosial kultural dan pemerintahan untuk peningkatan indeks profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Menerapkan reward and punishment secara objektif kepada pegawai berprestasi.

LKjIP 2021

Laporan Kinerja BKD Prov. Kaltim

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja dimasa yang akan datang.



Samarinda, Februari 2021
Kepala Badan Kepegawaian Daerah,

Drs. Diddy Rusdiansyah Anan Dani, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 196406271990031006

"BERANI UNTUK KALTIM BERDAULAT"

 bkdprovinsikaltim

 bkdprovkaltim

 Jl. M. Yamin No. 1 Samarinda

 <https://bkd.kaltimprov.go.id/>

 +62541-748549 / Fax.+62541-741925